

MENINJAU ULANG *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*: KAJIAN FILOSOFIS ATAS DILEMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA POST MODERN

Lailiy Muthmainnah

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Email: lailiy@ugm.ac.id

Rizal Mustansyir

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Sindung Tjahyadi

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada upaya untuk mempertanyakan kembali basis argumentasi yang dibangun dalam gagasan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilatar belakangi oleh fakta politik yaitu digunakannya kalkulasi untung-rugi dalam setiap kebijakan, tak terkecuali kebijakan pengelolaan lingkungan, yang kalkulasi ini sesungguhnya berakar pada tradisi filosofis utilitarian. Adapun pisau analisis yang digunakan adalah filsafat politik dengan unsur-unsur metodis yaitu deskripsi, interpretasi, analisis kritis, dan verstehen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemunculan konsep pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari modernitas dengan segala persoalan yang ditimbulkannya. Pada pemetaan konsep, sustainable development dapat dikategorikan ke dalam model postmodernisme yang konstruktif. Basis argumentasi sustainable development adalah menciptakan kondisi keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan kecukupan kebutuhan generasi yang akan datang. Namun hal ini nampaknya memunculkan sebuah persoalan baru karena tarik ulur pemaknaan keberlanjutan yang dimaksudkan banyak terjatuh pada konteks ekonomi sehingga kalkulasi cost-benefit ter-reduksi ke dalam kalkulasi cash-value. Akibatnya tujuan keseimbangan lingkungan hidup tidak tercapai. Hal ini akan menjadi sebuah dilema karena pada akhirnya harapan yang ditumpukan pada konsep pembangunan berkelanjutan untuk mampu

menggeser paradigma antroposentrisme ke arah ekosentrisme menjadi terhenti dan bahkan bermetamorfosis menjadi antroposentrisme bentuk baru.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, kalkulasi cost-benefit, antroposentrisme, ekosentrisme, post-modernisme.

Abstract

This study is an attempt to re-question the base arguments for sustainable development proposal with regard to environmental management. This attempt is important considering intensive deployment of cost and benefit calculations in every environmental management policy, which rooted in the utilitarian philosophical tradition. This research runs in the area of political philosophy and employs methodical components including description, interpretation, critical analysis, and verstehen. The current research suggests that the emergence of sustainable development as a concept of environment management goes along with modernity with all issues that it brings. The proposal of sustainable developments can be categorized into constructive postmodernism approach. The main purpose of this proposal is to create a condition of balance between the needs of the present generation and the adequacy of the needs of the future generations. However, the concept appears to raise a new concern considering the meaning of "sustainability" has become contestation with strong tendency to economic consideration which reduces the calculation of cost-benefits into cash-value calculations. This reductionis tendency leads to a dilemma considering the aspiration of shifting anthropocentrism to ecocentrism underlying behind concept of sustainable development will ironically produce a new forms of anthropocentrism.

Keywords: sustainable development, cost-benefit analysis, antropocentrism, ecocentrism, post-modernism.

PENDAHULUAN

Pada mulanya isu tentang kelestarian lingkungan hidup tidak terlalu ramai diperbincangkan, namun seiring dengan munculnya berbagai krisis lingkungan hidup di berbagai belahan dunia nampaknya posisi awal tersebut di atas mulai bergeser. Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, perubahan iklim, kekeringan, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi adalah kondisi nyata yang mulai dihadapi oleh umat manusia sekarang. Persoalan-persoalan lingkungan tersebut tidak hanya memunculkan kegelisahan tetapi

juga ketakutan mengingat dampaknya yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia.

Menurut Richard Steward dan James E Krier, krisis lingkungan yang sudah mengglobal dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal: pertama, pencemaran lingkungan (*pollution*); kedua, pemanfaatan lahan yang salah (*land mis-use*); ketiga, eksploitasi sumberdaya alam yang menyebabkan habisnya sumberdaya (*natural resource depletion*) (Steward & Krier, 1978). Tiga hal ini dapat dipahami dalam satu rangkaian bahwa turunnya kualitas lingkungan hidup yang mewujud dalam berbagai bentuk pencemaran lingkungan merupakan konsekuensi dari pemanfaatan sumberdaya alam secara serampangan dan eksploitatif.

Kondisi tersebut di atas terjadi hampir di setiap negara, namun menjadi semakin kuat terasa ketika revolusi industri di Eropa muncul yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri lainnya. Kondisi ini mulai terjadi pada kisaran tahun 1950an dimana negara-negara industri mulai melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap berbagai sumberdaya alam sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang terjadi ini ternyata tidak lagi bersifat lokal, namun telah berubah menjadi persoalan regional bahkan global.

Berbagai kerusakan lingkungan yang muncul tersebut kemudian memicu kegelisahan masyarakat di negara-negara industri pada kisaran tahun 1960an akhir hingga 1970an dengan mulai mempertanyakan kembali berbagai kebijakan negara yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Upaya mempertanyakan kembali orientasi pertumbuhan ekonomi tersebut dibingkai dalam kaitannya dengan keterbatasan sumberdaya fisik sebagai pendukung utama proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dalam *The Limits to Growth* yang memberikan gambaran krisis atau bencana lingkungan hidup dalam skala global sebagai akibat dari massifnya proses industrialisasi. Keterbatasan ekosistem (bumi) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inilah yang dijadikan landasan dalam membangun kesadaran atas kelestarian lingkungan. Maka tidak heran jika pada saat itu muncul tawaran ekstrim ke arah *zero growth* yang

diharapkan mampu tetap menjaga keutuhan lingkungan (Meadows, 1972).

Tawaran ke arah *zero growth* yang diajukan sebagai penjabaran dari paham ekosentrisme nampaknya tidak terlalu banyak menarik minat pihak-pihak terkait. Ekosentrisme dipandang terlalu sepihak memahami relasi manusia dan lingkungan, sehingga sesungguhnya tidak lebih moderat dari antroposentrisme. Perbedaannya hanyalah pada titik pijak yang digunakan sebagai orientasi nilai, yang tidak lagi berada pada manusia, melainkan alam.

Pada tahapan selanjutnya muncullah konsep *sustainable development*. Gagasan ini dipandang sebagai sebuah terobosan yang mampu memunculkan konsensus atas krusialnya isu lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya. Namun keberadaan *sustainable development* itupun bukan tanpa persoalan. Gagasan ini oleh banyak environmentalis dianggap tidak jelas keberpihakannya serta masih berkuat pada logika untung-rugi yang sejatinya berdasar pada filosofi utilitarianisme. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila selalu muncul dilema dalam praktik *sustainable development* terkait dengan orientasi atas nilai yang diinginkan untuk terus berkelanjutan. Meskipun demikian, konsep ini menjadi sebuah trend yang kemudian diadopsi oleh banyak negara dengan alasan kerealistikannya. Terlepas dari berbagai polemik yang muncul, sampai dengan sekarang gagasan *sustainable development* tetap menjadi idola dan diadopsi oleh banyak negara. Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti akan memfokuskan pada upaya untuk mempertanyakan kembali basis argumentasi dalam *sustainable development* untuk selanjutnya direfleksikan dan ditarik relevansinya dengan konteks pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di era postmodern.

PEMBAHASAN

Lingkungan hidup dalam Konteks Modernitas

Istilah modernitas dimaknai sebagai sebuah kondisi yang mengacu pada bentuk kehidupan sosial ataupun organisasi yang muncul di Eropa dari abad ke-17 dan sesudahnya sampai dengan abad 20an, yang kemudian mempengaruhi seluruh perkembangan masyarakat di dunia. Modernitas dibangun di atas pondasi

rasionalitas, optimisme, dan sifat positivis dalam diri manusia yang kemudian memunculkan konsekuensi berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara luar biasa. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi sangat kompleks, mengingat begitu banyak konsekuensi modernitas yang bersifat diskontinyu yang pada akhirnya mampu menggeser tatatan sosial tradisional melalui cara yang belum pernah ada sebelumnya (Giddens, 2009).

Berkaitan dengan makna modernitas tersebut di atas, maka pembahasan tentang lingkungan hidup dalam konteks modernitas akan dimulai dari cara pandang manusia dalam menyikapi dan menilai sesuatu di luar dirinya, yang hal ini akan melibatkan proses pergeseran masyarakat dari tradisional menuju modern.

Pada masyarakat tradisional, alam ditempatkan sebagai penentu realitas sehingga manusia adalah objek dari kekuatan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional akan berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan nalar bekerjanya alam. Jika dianalogikan dengan pemikiran Auguste Comte tentang tahapan perkembangan masyarakat, maka tahap inilah yang disebut dengan tahap metafisik. Apabila dalam tahapan teologis segala sesuatu yang terjadi diyakini karena adanya kekuatan supranatural yang dimiliki oleh dewa, roh, ataupun Tuhan, maka pada tahapan metafisik ini manusia mulai meyakini adanya kekuatan-kekuatan abstrak selain Tuhan, yaitu alam. Sementara itu masyarakat modern lebih bersifat positivistik. Masyarakat modern meyakini bahwa kekuasaan atas realitas berada di dalam diri manusia itu sendiri, bukan alam. Pada masyarakat modern segala sesuatu yang terjadi di alam dapat dijelaskan secara ilmiah melalui pembuktian empiris, bukan tergantung pada entitas metafisik (Abidin, 2002)

Sifat positivistik yang muncul dalam tahapan masyarakat tersebut kemudian dimaknai sebagai pengetahuan yang nyata (*real*), berguna (*useful*), tertentu (*certain*), dan pasti (*exact*) yang hal ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi dalam masyarakat modern. Massifnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian berjalan seiring dengan perkembangan kemampuan manusia untuk mengubah alam. Proses ini sekaligus mendasari proses terbentuknya kebudayaan modern. Seiring dengan hal tersebut di atas, terjadi pula proses akumulasi

modal dalam cakupan yang lebih luas. Akumulasi modal ini berjalan secara terus menerus, khususnya di negara-negara maju, yang tidak jarang hal ini dilakukan melalui proses eksploitasi di negara-negara berkembang.

Pada perkembangan lebih lanjut mulai muncul berbagai kekhawatiran atas sifat positif yang ada dalam kerangka besar modernitas. Hal ini dipicu dengan munculnya berbagai problem lingkungan yang semakin mengglobal sebagai konsekuensi logis dari eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran. Pada kisaran tahun 1960an muncul persoalan serius pada industri di Barat terkait dengan penggunaan pestisida (DDT) yang hal ini kemudian dituangkan oleh Rachel Carson dalam *Silent Spring* pada tahun 1962. Buku ini bercerita tentang kondisi musim semi yang tidak lagi indah, tidak ada lagi tanaman yang dapat tumbuh dan bersemi, tidak ada kicauan burung, tidak ada telur yang menetas, banyak ternak mati di padang rumput, ikan yang mati dalam jumlah ribuan, ibu dan anak mengalami sakit yang misterius, kelumpuhan, dsb. Carson menggunakan bahasa yang sangat puitis dan indah dalam mendeskripsikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebagai seorang ilmuwan biologi, Carson meneliti penyebab itu semua adalah menggunakan pestisida sintesis pada awal-awal revolusi hijau di lahan pertanian. Hal ini disebabkan karena pestisida tidak saja mematikan hama tanaman tetapi juga membunuh burung-burung, kupu-kupu, lebah, dan serangga lainnya yang membantu penyerbukan tanaman. Jejak pestisida melalui rantai makanan menjadi eksplanasi dari berbagai kondisi kerusakan lingkungan yang ada. Sebagai contoh misalnya, penyemprotan pestisida ternyata tidak hanya menghancurkan serangga tetapi juga musuh utama serangga, yaitu burung, sehingga ketika terjadi ledakan populasi serangga jumlah populasi burung tidak seimbang lagi untuk menjadi predator alami mereka (Radfords, 2011).

Silent Springs karya Rachel Carson tersebut kemudian mampu menggugah kesadaran masyarakat umum dan pembuat kebijakan untuk berhati-hati menggunakan teknologi. Buku ini juga mampu membuka pintu bagi berbagai penelitian lain dalam bidang lingkungan hidup yang kemudian mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa industrialisasi dan revolusi hijau harus disikapi

dengan ekstra hati-hati karena jika tidak akan membahayakan manusia sendiri dan berakibat fatal bagi seluruh makhluk hidup di bumi.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972 muncul buku yang ditulis oleh Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, dan William W. Behrens III yang berjudul *The Limits to Growth*. Buku ini sesungguhnya merupakan sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ahli tersebut di atas di bawah naungan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dengan sponsor dari *The Club of Rome*. Pada buku tersebut digunakan lima komponen utama kehidupan untuk menjelaskan kondisi bumi dan daya dukungnya, yaitu: populasi dunia, industrialisasi, pencemaran, produksi makanan, serta penipisan atau berkurangnya sumberdaya alam. Berdasarkan lima komponen utama tersebut disimpulkan bahwa: *pertama*, jika trend pertumbuhan yang terjadi saat itu terus berlanjut maka peradaban manusia akan mengarah pada kondisi *overshoot* yaitu melampaui batas pertumbuhan yang mampu diakomodasi oleh bumi. Keterbatasan daya dukung bumi untuk menopang kehidupan makhluk hidup ini harus sungguh-sungguh dipertimbangkan karena jika tidak maka akan menyebabkan terjadinya bencana peradaban. Kedua, apabila manusia menyadari kondisi pada poin satu tersebut di atas dan kemudian berupaya untuk mengubah trend pertumbuhan ekonomi maka dimungkinkan terjadi kestabilan ekologis dan kondisi yang lebih mengarah pada keberlanjutan. Dengan kata lain, jika manusia menghendaki kehidupan di bumi tetap terjaga dengan baik maka manusia harus menjaga keberlangsungan dirinya sendiri secara bijak. Apabila poin kedua ini disadari dan diterima maka upaya ke arah perubahan dapat semakin cepat dilakukan sehingga peluang keberhasilannya menjadi lebih besar (Meadows, 1972).

Munculnya karya-karya tersebut di atas menunjukkan bahwa sejak saat itu sesungguhnya telah mulai muncul kesadaran kolektif akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Sejak saat itu anggapan masyarakat modern bahwa alam adalah sesuatu yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan manusia mulai dipertanyakan ulang karena terbukti menimbulkan banyak masalah.

Kemunculan konsep *sustainable development* sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dengan proses kesadaran yang telah terbentuk seperti di paparkan di atas. Konsep *sustainable development* merupakan sebuah perspektif baru dalam melihat apa dan bagaimana pembangunan. Perspektif ini muncul dari kegelisahan atas apa yang telah dilakukan manusia terhadap alam untuk mencapai kemajuan (*progress*) sebagai cita-cita pembangunan. Berbagai bentuk eksploitasi manusia terhadap sumberdaya alam telah mengarah pada kondisi *over-exploitation* yang menyebabkan alam tidak mampu melakukan *recovery* kembali guna memulihkan daya dukungnya. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus maka akan menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang dan dapat menyebabkan munculnya berbagai bencana yang membahayakan umat manusia.

Konsep *sustainable development* tersebut secara jelas mulai mengemuka pada tahun 1980an sebagai upaya untuk mencari kompromi antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ada begitu banyak definisi tentang *sustainable development*, namun dari sekian banyak definisi yang paling sering digunakan adalah definisi dari The Brundland Commission yang mendefinisikan *sustainable development* sebagai sebuah proses perubahan dimana kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, investasi, penggunaan teknologi dan perubahan institusi yang ada selalu konsisten dalam memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang sebagaimana perhatiannya pada kebutuhan generasi saat ini (WCED, 1987).

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka *sustainable development* sesungguhnya merupakan sebuah upaya penyesuaian atas berbagai persoalan yang muncul dari diadopsinya konsep modernitas dalam pembangunan. *Sustainable development goals* kemudian didefinisikan sebagai "*universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity*". Adapun agenda SDGs sampai dengan tahun 2030 yang diadopsi oleh berbagai negara anggota PBB adalah menyiapkan blueprint bagi tercapainya kondisi kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia maupun planet bumi, baik sekarang maupun yang akan datang. Hal ini yang kemudian tertuang dalam 17 program utama SDGs (Gigliotti et al., 2018). Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa dalam gagasan SDGs upaya untuk melindungi planet bumi tidak terlepas

dari kepentingan untuk menciptakan kemakmuran dan perdamaian, serta menghilangkan kemiskinan. Hal ini menarik karena kemudian menunjukkan spirit dari gagasan SDGs sesungguhnya tetap tidak dapat lepas dari akar gagasan modernitas tentang kemajuan dan kemakmuran, meskipun hal tersebut dilakukan dengan berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan manusia dan bumi sebagai ekosistem.

Namun sayangnya, upaya menciptakan keseimbangan tersebut masih sering dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan sempit yang membahayakan umat manusia dalam jangka panjang. Praktik dari konsep ini juga memicu banyak perdebatan karena kemudian akan sangat tergantung pada sisi mana yang hendak ditonjolkan, apakah pertimbangan ekonomi ataukah lingkungan yang pada kenyataannya dua hal ini sulit untuk dikompromikan. Maka tidak heran apabila pada akhirnya masih sering dijumpai berbagai kebijakan yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan. Hal ini pada akhirnya akan bermuara pada pertanyaan orientasi nilai apa yang sesungguhnya mendasari berbagai pilihan kebijakan ataupun tindakan manusia. Apa yang dianggap bernilai, serta siapa yang menjadi subjek penilai? Pertanyaan ini kemudian akan membawa kita pada perdebatan tentang antroposentrisme dan ekosentrisme dengan berbagai ragam varian yang muncul di dalamnya.

Ideologi Pengelolaan Lingkungan : Perdebatan Antroposentrisme - Ekosentrisme

Pembahasan tentang ideologi pengelolaan lingkungan akan selalu jumbuh dengan orientasi nilai yang dianut dalam konteks tersebut. Hal ini pada akhirnya akan membawa pada perdebatan klasik antara antroposentrisme dan ekosentrisme.

Bermula dari gagasan Rene Descartes dengan *cogito ergo sum*, aku berpikir maka aku ada, maka ada atau tiadanya manusia kemudian diukur dari sebuah proses berpikir. Dimulai dari fase ini, perubahan paradigma terjadi. Rasio menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan hubungan manusia dengan berbagai hal di luar dirinya, tak terkecuali hubungan manusia dengan alam. Paradigma baru ini membangun sebuah optimisme dengan menempatkan manusia sebagai poros utama. Kondisi ini membawa

konsekuensi berupa keyakinan bahwa alam bukan lagi sebagai penentu dengan sifat mutlak yang dimilikinya, melainkan alam dapat diubah oleh manusia melalui berbagai perkembangan teknologi yang dicipta. Penerimaan terhadap paradigma ini kemudian membawa konsekuensi pada difungsikannya segala hal yang berada di luar diri manusia sebagai sumberdaya atau objek semata. Dari sinilah sesungguhnya asal muasal pemikiran tentang antroposentrisme itu muncul.

Antroposentrisme sebagai sebuah aliran mendasarkan argumentasi pada keyakinan bahwa manusia adalah penguasa dan penentu realitas yang akan menentukan apa yang menjadi dan terjadi pada dirinya. Oleh karena itu segala sesuatu yang berada di luar diri manusia akan diperlakukan sebagai objek yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dirinya (Kuntowijoyo, 1998).

Pada konteks pengelolaan lingkungan hidup, gagasan antroposentrisme ini mewujud dalam bentuk keyakinan yang meletakkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme sebagai sebuah paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup mendasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam semesta. Manusia dengan berbagai kepentingannya adalah pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan alam. Hal ini disebabkan karena keyakinan bahwa hanya manusia yang memiliki nilai, sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya akan bernilai sejauh hal tersebut menunjang kepentingan manusia. Alam hanya memiliki nilai sejauh keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi manusia, sehingga di dalam diri alam itu sendiri tidak terdapat nilai (Keraf, 2005).

Sudut pandang antroposentrisme ini menyebabkan terjadinya relasi sepihak yang didominasi oleh manusia. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi berupa model pengelolaan sumberdaya yang cenderung bersifat eksploitatif dan hanya berorientasi pada profit.

Berbeda dengan antroposentrisme, ekosentrisme mengambil posisi sebaliknya. Ekosentrisme menempatkan seluruh subjek yang ada di alam semesta (biotis maupun abiotis) sebagai hal yang

memiliki nilai karena keduanya akan terikat satu sama lain dalam sebuah ekosistem.

Ekosentrisme dalam teori etika lingkungan merupakan kelanjutan dari biosentrisme. Apabila biosentrisme hanya meletakkan komunitas biotis sebagai subjek yang memiliki nilai, maka ekosentrisme bertindak lebih jauh dengan menempatkan seluruh komunitas ekologis (biotis maupun abiotis) sebagai subjek yang memiliki nilai. Meskipun berbeda, namun dua konsep ini memiliki kesamaan dalam hal mendobrak pemikiran antroposentrisme dengan jalan memperluas cakupan nilai tidak hanya berlaku bagi manusia saja (Keraf, 2005).

Pada penelitian ini gagasan biosentrisme tidak akan ikut diperdebatkan. Peneliti akan memfokuskan pada gagasan ekosentrisme dan antroposentrisme saja untuk menunjukkan kondisi perbedaan pada level paradigmatik secara total.

Ekosentrisme meyakini bahwa alam tidak semata-mata bersifat instrumental, yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia belaka, melainkan lebih dari itu alam memiliki nilai intrinsik. Seluruh komunitas ekologis memiliki nilai intrinsik terlepas dari hal tersebut dapat memberikan manfaat ataupun tidak bagi umat manusia. Namun yang pasti adalah akan selalu muncul keterkaitan antara yang satu dengan yang lain (biotis maupun abiotis) dalam sebuah jaring-jaring kehidupan atau ekosistem (Capra, 2002). Oleh karena itu ekosentrisme tidak berbicara dengan logika untung rugi sebagaimana antroposentrisme, melainkan lebih pada upaya untuk menciptakan keseimbangan antara seluruh komponen dalam komunitas ekologis tersebut (Cobb, 1972). Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Arne Naess dalam *Deep Ecology*, bahwa manusia bukanlah subjek tunggal yang menjadi pusat dari kehidupan, melainkan seluruh elemen yang ada dalam ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan. Oleh karena itu diperlukan suatu kearifan di dalam pengelolaan relasi tersebut sehingga akan terbentuk sebuah sinergi yang bersifat sistemik.

Mempertanyakan Ulang Posisi Teoritik Sustainable Development

Berdasarkan pemaparan teori tentang etika lingkungan tersebut di atas, maka dapat dikaji lebih dalam terkait dimana sesungguhnya

posisi teoritik *sustainable development*. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa kemunculan *sustainable development* tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan lingkungan yang muncul atas diadopsinya konsep modernitas dalam pembangunan. Logika modernitas yang meyakini bahwa manusia mampu mencapai kemajuan (*progress*) ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya alam telah membawa ke arah kondisi eksploitasi sumberdaya. Hal ini disebabkan karena alam adalah sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Manusia pada sudut pandang ini merupakan ukuran nilai. Oleh karena itu secara tegas dapat disimpulkan bahwa pada konsep modernitas dasar nilai yang digunakan adalah antroposentrisme.

Bagaimana halnya dengan *sustainable development*? Apakah gagasan ini mendasarkan diri pada orientasi nilai ekosentrisme? Untuk menjawab hal ini, maka akan dijelaskan kembali mengenai apa itu *sustainable development*.

Konsep *sustainable development* mulai dipopulerkan pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development melalui laporannya yang berjudul *Our Common Future*. Komisi yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland ini menyampaikan sebuah strategi lingkungan jangka panjang untuk mengarahkan pada kondisi tercapainya pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2000. Selain itu, komisi ini juga mengidentifikasi hubungan antar manusia, sumberdaya, lingkungan dan pembangunan yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional dan internasional. Mengacu pada definisi *sustainable development* yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa *sustainable development* adalah sebuah proses yang berupaya menyeimbangkan perhatian atas kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang atas segala bentuk pemanfaatan maupun eksploitasi sumberdaya alam, investasi, penggunaan teknologi maupun perubahan institusi maka sesungguhnya secara implisit konsep ini mencoba untuk membawa kondisi pengelolaan lingkungan menjadi lebih ke arah ekosentris. Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah mekanisme kompromi yang digunakan oleh *sustainable development*, yaitu dengan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, seringkali terjatuh pada persoalan

praktis. Muncul banyak perdebatan dan perbedaan dalam mengaplikasikan konsep ini, sangat tergantung pada sisi mana yang ingin ditonjolkan, apakah pertimbangan ekonomi atau lingkungannya. Padahal dalam praktiknya dua hal tersebut nyaris tak pernah dapat berkompromi. Yang banyak terjadi kemudian adalah beberapa indikator kelestarian lingkungan yang dibuat cenderung dikemas semata-mata untuk kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan proses kemunculannya, maka logika awal yang dibangun oleh *sustainable development* jelas tidak terpisah dari logika modernis maka tidak mengherankan apabila mekanisme yang ditawarkan oleh *sustainable development* cenderung teknosentris. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam upaya mendesain ulang pasar dan proses produksi untuk disesuaikan dengan logika bekerjanya alam. Selain itu juga *sustainable development* menggunakan mekanisme pasar dan akumulasi kapital untuk melakukan prediksi atas kondisi alam di masa yang akan datang. Kestabilan stok kapital dari alam menjadi syarat utama bagi tercapainya kondisi lestari (Banerjee, 1999). Kritik Banerjee ini jelas menunjukkan bahwa orientasi *sustainable development* sesungguhnya belum bergeser dari titik pijak antroposentrisme. Hal senada juga dipaparkan oleh Bruce Mitchell, dkk., yang mengatakan bahwa pernyataan yang selalu dikutip dari Komisi Brundtland adalah bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun demikian, ada pernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Dua konsep kunci tersebut adalah (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang; (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan (Mitchell, 2000). Oleh karena itu sesungguhnya gagasan *sustainable development* tetap berpijak pada konsep antroposentris, yaitu menjadikan manusia sebagai tema sentralnya. Maka tidak mengherankan apabila di dalam pelaksanaan konsep ini masih setia menggunakan kalkulasi *cost-benefit* yang tidak jarang terjatuh pada sekedar kalkulasi pada nilai-nilai real. Hal ini dapat dijumpai pada berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan, semisal pada kasus izin

pengelolaan dan konversi hutan, pertambangan, pendirian industri, dsb.

Mekanisme kalkulasi *cost-benefit* tersebut menjadi dasar semua kebijakan publik yang diambil. Semua faktor dimasukkan kemudian dihitung dalam sebuah perhitungan matematis untuk kemudian dijumlahkan mana yang mampu memberikan keuntungan terbesar dan resiko dampak minimal. Pada berbagai studi kebijakan disimpulkan bahwa melalui mekanisme kalkulasi *cost-benefit* mampu diperoleh keunggulan relatif, khususnya dalam konteks ekonomi. Hal ini tentu memberikan angin segar bagi negara-negara yang memang mengejar pertumbuhan ekonomi, namun menjadi malapetaka tatkala dilihat dari aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena kecenderungan kalkulasi yang hanya mengarah pada sekedar kalkulasi nilai-nilai real dan mengabaikan nilai-nilai yang bersifat normatif. Inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar dalam aplikasi konsep *sustainable development*.

Dilema *Sustainable Development*: Keengganan Meninggalkan Kalkulasi Utilitarian

Apabila ditelusur lebih jauh, mekanisme kalkulasi *cost-benefit* tersebut tidak lepas dari salah satu aliran etika dalam filsafat, yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme lebih dikenal sebagai bentuk filsafat moral dan politik yang mendasarkan pada gagasan bahwa tindakan atau kebijakan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat. Setidaknya, demikian definisi yang diberikan oleh kaum utilitarianisme tradisional tentang utiliti, yang dikenal dengan slogan *greatest happiness of the greatest number* (Mulgan, 2007).

Sebagai sebuah filsafat moral dan politik utilitarianisme menghadapi banyak tantangan terkait dengan upayanya untuk memperjuangkan utiliti. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumberdaya yang ada untuk menciptakan kondisi maksimalisasi utiliti tersebut bagi setiap warga negara. Selain itu juga beragamnya preferensi setiap orang yang mungkin saja bertentangan satu sama lain dalam upaya maksimalisasi utiliti.

Meskipun demikian, utilitarianisme sebagai sebuah filsafat moral dan politik tetap memiliki daya tarik. Daya tarik tersebut adalah (Kymlicka, 2004);

- a. Daya tarik yang pertama yaitu tujuan yang dipromosikan oleh utilitarianisme tidak tergantung pada entitas metafisik (misalnya Tuhan, jiwa, kesadaran, dll).
- b. Daya tarik yang kedua yaitu utilitarianisme merupakan paham konsekuensialis. Paham ini menekankan pada setiap individu untuk menilai tindakan atau kebijakan berdasarkan akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari pilihan tindakan atau kebijakan tertentu tersebut. Paham konsekuensialis tersebut juga menegaskan bahwa sebuah tindakan atau kebijakan dapat dikatakan baik secara moral tatkala mampu membuat kehidupan manusia (warga negara) menjadi baik, dan sebaliknya dapat dikatakan salah secara moral ketika membuat kehidupan manusia menjadi lebih buruk.

Gagasan utilitarianisme tersebut di atas sangat menarik secara intuitif sebab kesejahteraan manusia merupakan hal yang utama dan oleh karenanya semua aturan harus diuji berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkannya pada kesejahteraan manusia. Namun demikian, pada kenyataannya definisi utiliti itu sendiri merupakan sesuatu yang diperdebatkan, setidaknya ada empat definisi utiliti menurut (Kymlicka, 2004), yaitu :

1. Hedonisme kesejahteraan

Sudut pandang hedonisme kesejahteraan mendefinisikan utiliti berupa pengalaman atau sensasi kenikmatan. Menurut sudut pandang ini manusia pada dasarnya akan senantiasa berupaya untuk mengejar kesenangan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*). Hal ini merupakan kebutuhan empiris manusia yang akan selalu dikalkulasi secara kuantitatif.

2. Kemanfaatan keadaan mental non hedonistik

Definisi utiliti yang kedua adalah kemanfaatan keadaan mental non hedonistik. Perspektif yang muncul pada definisi yang kedua ini menolak jika utiliti hanya dilekatkan pada pengalaman atau sensasi yang menyenangkan (hedonistik) saja. Hal ini disebabkan karena semua bentuk pengalaman atau sensasi yang dialami oleh

manusia adalah sesuatu yang bernilai yang tidak dapat direduksi ke dalam satu kondisi mental seperti misalnya kebahagiaan saja.

3. Kepuasan preferensi

Definisi utiliti yang ketiga adalah kepuasan preferensi. Menurut sudut pandang ini, meningkatkan utiliti orang berarti memuaskan preferensinya apapun preferensinya tersebut. Definisi ini memperoleh banyak kritik karena telah mengaburkan pemahaman antara *apa yang sekarang ini disukai* oleh seseorang dengan *apa yang berharga* untuk dimiliki atau dilakukan seseorang. Apa yang baik atau bernilai bagi seseorang bisa jadi berbeda dengan apa yang diinginkannya atau menjadi preferensinya sekarang. Pada konteks ini memiliki keinginan atau preferensi tidak membuat sesuatu bernilai, melainkan karena sesuatu hal (objek) tertentu memiliki nilai maka seseorang memiliki preferensi terhadapnya.

4. Preferensi yang berpengetahuan

Definisi tentang utiliti yang keempat adalah preferensi yang berpengetahuan. Definisi ini muncul untuk melengkapi kekurangan yang ada pada definisi utiliti pada poin 3 di atas. Menurut sudut pandang ini, utiliti harus dimaknai sebagai kepuasan preferensi yang didasarkan pada informasi yang lengkap dan pertimbangan yang benar (rasional).

Terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul dikalangan kaum utilitarian dalam mendefinisikan apa itu utiliti, sesungguhnya ada satu benang merah yang dapat ditarik diantara berbagai sudut pandang tersebut, yaitu bahwa sebuah tindakan atau kebijakan yang tepat menurut utilitarianisme adalah yang bertujuan memaksimalkan utiliti. Adapun mekanisme maksimalisasi utiliti tersebut dapat dijalankan melalui dua model, yaitu *act utilitarianism* dan *rule utilitarianism*.

Pada model pertama yaitu *act utilitarianism* atau utilitarianisme tindakan, maka utilitarianisme diletakkan sebagai doktrin moral komprehensif dimana setiap individu adalah *U-agent* yang akan selalu melakukan perhitungan utilitarian secara sadar dalam setiap tindakan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menilai tindakan mana yang dianggap akan lebih memuaskan preferensi mereka. Namun model utilitarian ini banyak memperoleh kritik. Setidaknya ada dua kritik utama yang muncul dengan mekanisme utilitarianisme

langsung, yaitu model ini meniadakan adanya kewajiban khusus seseorang terhadap orang tertentu serta dimungkinkannya akan masuk preferensi yang tidak sah untuk dihitung sebagai utiliti (Kymlicka, 2004) bdk (Mulgan, 2007).

Mekanisme yang kedua yaitu *rule utilitarianism* atau utilitarianisme aturan yang lebih menekankan pada *political utilitarianism*. Pada model ini sangat mungkin sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu dijalankan dengan tidak mengikuti mekanisme utilitarian secara langsung, namun tujuan memaksimalkan utiliti tetap merupakan tujuan utama. Pada konteks ini utilitarianisme dipahami sebagai standar kebenaran moral bukan prosedur keputusan sehingga tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan utiliti, namun bukan berarti harus secara sengaja mencoba memaksimalkan utiliti. Utilitarianisme aturan atau sering disebut juga utilitarianisme tidak langsung mengajarkan bahwa prinsip utilitas hanya boleh digunakan oleh lembaga-lembaga sosial dan pemerintah guna menjamin maksimalisasi utiliti yaitu terwujudnya kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar masyarakat (Kymlicka, 2004) bdk (Mulgan, 2007). Rawls menyebut *rule utilitarianism* ini sebagai utilitarianisme teleologis. Sudut pandang ini menempatkan maksimalisasi utiliti sebagai *telos* yang harus dituju dan tidak memfokuskan pada gagasan tentang egalitarian sebagaimana yang diyakini pada *act utilitarianism*. Sudut pandang ini menekankan pada upaya untuk membawa keadaan menjadi lebih baik dan tidak memfokuskan pada prinsip memperlakukan orang secara sama (egalitarian). Hal ini disebabkan karena manusia hanyalah satu bagian saja di dalam jaringan pemaksimalan utiliti. Oleh karena itu pusat perhatian tetap diletakkan pada keadaan kebaikan (*telos*) yang dalam konteks ini berupa pemaksimalan utiliti.

Berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu dilema konsep *sustainable development* sesungguhnya berakar pada persoalan tentang apa yang dimaknai sebagai utiliti tersebut, sehingga harus di jaga sustainabilitasnya. Hal ini pada akhirnya akan kembali bermuara pada dua sudut pandang utama, yaitu utilitas dimaknai dalam kerangka besar kelestarian lingkungan jangka panjang atukah utilitas dimaknai dalam kerangka pikir jangka pendek yaitu pertumbuhan ekonomi. Apabila utilitas dimaknai sebagai kondisi

kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, maka implikasi praktis yang kemudian muncul adalah akan digunakannya prinsip kehati-hatian dan non-eksplotatif dalam pengelolaan sumberdaya. Orientasi tidak lagi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi melainkan keseimbangan ekosistem. Pilihan orientasi ini sekaligus menyaratkan adanya kemauan untuk mengendalikan berbagai hasrat konsumsi manusia yang sangat massif. Di sisi yang lain, apabila utilitas hanya dimaknai sebagai kemanfaatan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, maka berbagai pilihan tindakan maupun kebijakan pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan untuk memuaskan hasrat konsumsi manusia dan mengejar target pertumbuhan ekonomi semata. Pilihan orientasi yang kedua ini bisa saja dibungkus dengan mekanisme-mekanisme yang tampaknya pro kelestarian lingkungan, namun biasanya hal tersebut hanya berhenti dalam tataran formalitas belaka, dengan tanpa menyentuh esensi persoalan yang sesungguhnya. Sebagai contoh adalah diwajibkannya studi AMDAL sebelum sebuah industri tertentu akan dibangun di wilayah tertentu. Peran AMDAL seharusnya dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol bagi berbagai industri yang layak berkembang ataupun tidak. Namun sampai sejauh ini, keberadaan AMDAL hanya dimaknai sebatas ijin usaha yang bersifat formal tanpa ada mekanisme evaluasi dan kontrol secara tegas, jelas, dan kontinyu. Kelemahan-kelemahan semacam ini juga banyak terjadi pada berbagai sektor pengelolaan lingkungan lainnya semisal kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hal ini mengindikasikan bahwa *sustainable development* yang didengung-dengungkan pada praktiknya kemudian terhenti sebatas slogan karena masih dominannya kalkulasi kemanfaatan dalam jangka pendek oleh berbagai pihak terkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini melibatkan banyak aktor, baik di level lokal, nasional, regional, maupun global. Kuatnya kepentingan para kapitalis selaku pemilik modal tersebut menyebabkan konsep *sustainable development* menjadi terjebak pada sekedar urusan teknis (teknosentrisme) dan gamang untuk secara tegas perpihak pada upaya menonjolkan kelestarian lingkungan sebagai nilai kemanfaatan yang ingin dituju.

Postmodernisme dan Pengelolaan Lingkungan

Memasuki era post-modern muncul beberapa upaya untuk mempertanyakan kembali makna pembangunan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertanyakan kembali *grand narratives* terkait mitos pembangunan bahkan juga dengan menolak modernisme. Pada konteks ini pemaknaan atas pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi mulai dipertanyakan ulang, karena makna pembangunan itu sendiri adalah sesuatu yang masih dapat diperdebatkan.

Istilah postmodernisme ini sendiri pada mulanya diarahkan pada serangkaian pendirian filsafat dan gaya estetika yang sudah berkembang sejak 1950-an. Pada sudut pandang postmodernisme dibalik segala sesuatu ada keyakinan bahwa semua pengetahuan manusia terbatas dan terkondisi secara kultural. Oleh karena itu tiap zaman berpikir dengan cara tertentu dimana umat manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Akibatnya, tidak ada jalan untuk berdiri di luar wacana untuk memperoleh kebenaran murni (O'Donnell, 2003).

Pandangan negatif banyak ditujukan pada postmodernisme karena dianggap sebagai post-strukturalis yang umumnya kaum neo-Nietzschean. Hal ini berakibat pada penyamaan post-strukturalis sebagai kaum dekonstruksionis saja. Padahal dalam kenyataannya, post-modernisme terdiri atas beragam pemikiran, yang apabila dikategorisasikan secara sederhana maka akan mengarah pada dua kelompok, yaitu postmodernisme dekonstruktif (Derrida, Lyotard, Foucault, dan Rorty) dan postmodernisme konstruktif atau revisioner (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Mary Hesse (tradisi hermeneutika), David R. Griffin, Frederic Ferre, D. Bohm (studi proses Whiteheadian), Fritjof Capra, J. Lovelock, Gary Yukav, I. Prigogine (tradisi fisika holistik) (Sugiharto, 1996).

Terkait dengan penjelasan tersebut di atas, maka tanggapan atas modernisme dan problem lingkungan dapat juga dimasukkan dalam dua tahap analisis. Pada konteks postmodernisme dekonstruktif maka modernisme dengan spirit materialisme dan konsumerisme telah menyebabkan rusaknya lingkungan serta terkurasnya semangat dan nilai masyarakat. Modernisme yang berkelidatan erat dengan kapitalisme telah menyebabkan degradasi ekologi yang luar biasa. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila definisi pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi harus ditinjau ulang. Pembangunan

tidak hanya sekedar pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, tetapi di dalam pembangunan tersebut juga terjadi pergeseran pola pikir, pola perilaku maupun gaya hidup.

Hal tersebut di atas adalah kondisi pada sebuah sisi. Sementara itu pada sisi yang lainnya proses pembangunan juga telah menyebabkan terjadinya peningkatan kekuatan produksi, khususnya para pemilik modal. Disadari ataupun tidak, proses pembangunan yang telah berjalan selama ini dengan prototipe modernis, telah terlalu berat sebelah dan dominan menguntungkan pihak pemilik modal. Dengan model pembangunan yang demikian, maka keadilan bagi seluruh warga masyarakat akan sulit tercapai. Hal ini dikarenakan orientasi utama dalam modernisme terkonsentrasi pada subjek/diri bukan komunitas. Maka tak heran apabila meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan selaras dengan meningkatnya kesejahteraan dan terwujudnya keadilan ekonomi di masyarakat. Hal ini terjadi sebab distribusi kesejahteraan masih banyak berkuat di pusaran para pemilik modal.

Namun jika dilihat dari perspektif post-modernisme konstruksionis maka akan ditemukan mekanisme-mekanisme untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang timbul dari modernisme tersebut, termasuk dalam hal ini problem kerusakan lingkungan. Kemunculan *sustainable development* pada konteks ini merupakan bentuk nyata dari wajah postmodernisme konstruksionis. Apa yang dilakukan oleh *sustainable development* memang diawali dengan membongkar beberapa aspek penggambaran dalam dunia modern yang salah satunya ditunjukkan dengan dominannya persoalan kelestarian lingkungan, namun pada akhirnya konsep ini tetap mempertahankan berbagai aspek dalam kemodernan itu sendiri dan kemudian berupaya mengkonstruksi sebuah gambaran dunia yang baru. Sebuah penggambaran tentang kondisi ideal relasi ekonomi dan lingkungan sehingga harapannya kondisi ke arah keberlanjutan akan dapat diwujudkan. Namun sayangnya, harapan ke arah kondisi ideal tersebut tampaknya masih jauh dari harapan. Realitas politik menunjukkan bahwa dominasi ekonomi atas isu lingkungan kian menggurita dengan semakin kuatnya posisi pemilik modal. Sejauh kondisi ini belum berubah maka pertimbangan lingkungan masih

akan tetap berada di area abu-abu dan harapan ke arah keberlanjutan akan berhenti pada wacana belaka.

SIMPULAN

Mengglobalnya isu lingkungan hidup telah menempatkan isu ini pada sebuah posisi yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena di dalam setiap isu lingkungan akan selalu terdapat keterkaitan dengan berbagai macam kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, ekologi, bahkan juga etika. Maka tidak mengherankan apabila dalam sebuah persoalan lingkungan hidup selalu muncul keruwetan-keruwetan sebagai akibat dari tumpang tindih berbagai kepentingan yang muncul dan ingin diadopsi.

Kemunculan konsep *sustainable development* tidak dapat dilepaskan dari gagasan tentang modernitas. Modernitas dengan pijakan dasar rasionalitas telah membawa manusia pada pola pikir antroposentris dalam pengelolaan sumberdaya. Kondisi ini membawa implikasi terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup secara signifikan. Yang apabila dibiarkan terus berlanjut maka akan membahayakan peradaban.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut di atas, *sustainable development* dengan gaya postmodernis-konstruksionisnya mencoba memberikan tawaran wacana baru atas pembangunan. Tawaran resep yang diberikan oleh *sustainable development* diharapkan mampu membawa pada kondisi yang lebih ideal dalam relasi manusia dan alam, karena di dalam eksploitasi sumberdaya yang dilakukan oleh generasi sekarang harus dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Namun demikian harus diakui bahwa optimisme yang dibawa oleh *sustainable development* memang belum sampai membawa perubahan pada tataran paradigmatis pengelolaan lingkungan. Bahkan dalam praktiknya, tidak jarang ditemui bahwa substansi kebijakan masih berkuat pada domain antroposentrisme seperti yang terlihat ketika dalam sebuah kebijakan publik masih sangat berorientasi pada kalkulasi *cost-benefit* yang ujung akhirnya selalu menghitung keuntungan hanya dalam kerangka pikir nilai-nilai yang bersifat real (*cash value*). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan dilema dalam aplikasi konsep *sustainable development*. Spirit *sustainable*

development yang sejak awal ingin membawa kondisi ke arah keberlanjutan kemudian dipertanyakan lagi, karena pada titik mana keberlanjutan tersebut akan ditonjolkan. Keberlanjutan lingkungan dengan daya dukungnya atautkah keberlanjutan ekonomi dalam kerangka besar pembangunan. Hal inilah yang kemudian menjadikan *sustainable development* masih terbuka peluang untuk diperdebatkan karena pada akhirnya semua akan terbukti dalam praktik. Dan sejauh ini nampaknya tarik ulur kepentingan ekonomi dan lingkungan masih dimenangkan oleh kepentingan ekonomi. Tentu saja hal ini dapat terjadi karena masih kuatnya peran penguasa dan pemilik modal dalam menentukan model pengelolaan berbagai sumberdaya yang ada. Apabila kondisi ini masih terus berlanjut maka harapan bahwa *sustainable development* mampu mendekatkan orientasi nilai ke arah ekosentris hanya akan menjadi sebuah harapan kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2002). *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Banerjee, S. B. (1999). *Sustainable Development and Reinvention of Nature*. United Kingdom: Critical Management Studies Conference.
- Capra, F. (2002). *Jaring-jaring Kehidupan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Cobb, J. B. (1972). *It is Too Late? A Theology of Ecology*. California: Bruce/Beverly Hills.
- Giddens, A. (2009). *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Gigliotti, M., Schmidt-Traub, G., & Bastianoni, S. (2018). The sustainable development goals. In *Encyclopedia of Ecology*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10986-8>
- Keraf, A. S. (2005). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Kuntowijoyo. (1998). *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aki*. Bandung: Mizan.
- Kymlicka, W. (2004). *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meadows, Donella H., et. al. (1972). *The Limits to Growth*. New York: Universe Books.
- Mitchell, B. (2000). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulgan, T. (2007). *Understanding Utilitarianism*. United Kingdom: Acumen Publised Limited Stockfield Hall.
- O'Donnell, K. (2003). *Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Radfords, T. (2011). *Silent Spring by Rachel Carson – review*. 30 September 2011.
<https://www.theguardian.com/science/2011/sep/30/silent-spring-rachel-carson-review>.
- Steward, R., & Krier, J. E. (1978). *Environmental Law and Policy*. Indiana Polis: The Bobbs Merrill Co. Inc.
- Sugiharto, I. B. (1996). *Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Acronyms and Note on Terminology Chairman's Foreword. In *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*.